

**PERJANJIAN KINERJA
KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN 2016**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
MISI I		
1. Meningkatnya nilai Indeks Pembangunan Manusia.	1 Indeks Pembangunan Manusia	67%
2. Meningkatnya pemenuhan dan pemerataan kebutuhan dasar masyarakat bidang pendidikan.	2 Tingkat daya tampung pendidikan PAUD	52%
	3 Angka Partisipasi Murni SD/MI	104%
	4 Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	84,6%
	5 Angka Partisipasi Murni SMA/MA	130,57%
	6 Rata-rata lama sekolah	9,54%
	7 Angka melek huruf usia 15-24 tahun	97,80%
	8 Jumlah SD/MI yang semua rombongan belajar (rombel) nya tidak melebihi 32 Orang	57%
9 Jumlah SMP/MTs yang semua rombongan belajar (rombel) nya tidak melebihi 36 orang	82%	
10 Jumlah SD/MI yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas, meja/ kursi, dan papan tulis untuk setiap rombel	30 Sekolah	
11 Jumlah SMP/MTs yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas, meja/kursi, dan papan tulis untuk setiap rombel	56%	
12 Jumlah SMP/MTs yang memiliki ruang laboratorium IPA yang dilengkapi meja dan kursi untuk 36 peserta didik	16%	
13 Jumlah SMP/MTsyang memiliki satu set peralatan IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik	40%	
14 Jumlah SD/MI yang memiliki set peraga dan bahan IPA secara lengkap	85%	
15 Jumlah SMP/MTs yang menyelenggarakan proses pembelajaran di sekolah selama 34 minggu per tahun	100%	

	16	Jumlah SD/MI yang menyelenggarakan proses pembelajaran di sekolah selama 34 minggu per tahun	100%
	17	Jumlah SMP/MTs yang memiliki guru dengan kualifikasi S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik $\geq 35\%$	14%
	18	Jumlah Kepala SD/MI yang berkualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah bersertifikat pendidik	23%
	19	Jumlah Kepala SMP/MTs yang berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah bersertifikat pendidik	34%
3. Meningkatnya Kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat	20	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	95,64%
	21	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	71,18%
	22	Pertolongan persalinan oleh bidan atau nakes yang mempunyai kompetensi kebidanan	96,00%
	23	Cakupan pelayanan nifas	94,36%
	24	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	71,09%
	25	Cakupan kunjungan bayi	96,82%
	26	Cakupan kelurahan/desa Uci	93,18%
	27	Cakupan pelayanan anak balita	88,00%
	28	Cakupan penderita gizi buruk mendapatkan perawatan	81,82%
	29	Cakupan peserta KB aktif	74,82%
	30	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit AFP, pneumonia balita, TB paru, DBD dan Diare	100,00%
	31	Cakupan yankesdas masyarakat miskin	98,18%
	32	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin	100,00%

	33	Cakupan kelurahan/ desa mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi	100,00%
	34	Jumlah masyarakat miskin yang di rujuk ke Rumah Sakit Daerah	1.500 Pasien
	35	Rata-Rata kunjungan Rawat jalan Per hari	80 Pasien
4. Meningkatnya standar Mutu Pelayanan Rujukan, rawat jalan dan dan rawat inap	36	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa	12 Unit
	37	Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana kesehatan	35 Unit
MISI II			
5. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	38	Tingkat Pelayanan Surat yang Keluar dan Masuk	90%
	39	Tingkat Penyelamatan dan Pelstarian Dokumen/Arsip Daerah	2 SKPK
	40	Persentase Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	45%
6. Meningkatnya sinergitas dan terakomodirnya aspirasi masyarakat dalam perencanaan daerah	41	Tingkat Keselarasan RKPD dengan RPJMD	80%
	42	Tingkat keselarasan Renstra SKPD dengan RPJMD	80%
	43	Tingkat Keselarasan Renja SKPD dengan RKPD	80%
	44	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan	16 Jenis
7. Meningkatkan pengelolaan kekayaan daerah yang transparan dan akuntabel	45	Tingkat derajat desentralisasi (PAD/Penerimaan Daerah)	98%
	46	Tingkat efesiensi Pemungutan PAD (Penerimaan PAD/Potensi PAD)	98%
	47	Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah	WTP
8. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perangkat daerah	48	Jumlah Raqan SOTK, UPTD yang diselesaikan	2 SKPK
9. Meningkatnya fasilitasi penanganan konflik pertanahan daerah	49	Jumlah Fasilitasi konflik pertanahan yang ditindaklanjuti	3 HGU

10. Meningkatnya pengembangan pembangunan Kampung	50	Jumlah Tapal Batas Desa yang diselesaikan	30 Desa
	51	Jumlah Desa yang memiliki Peta Administrasi	16 Desa
11. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan	52	Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah	12 SKPK
	53	Persentase pencapaian sistem AKIP berdasarkan hasil evaluasi	55%
12. Meningkatnya Legislasi Peraturan Perundang-undangan	54	Peringkat Prestasi kinerja Berdasarkan evaluasi LPPD	Peringkat 3
	55	Jumlah Laporan rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	120 Rekomendasi
	56	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	42 Kasus
	57	Cakupan Legislasi Produk Hukum (Raqan, Perbup)	7 Qanun
13. Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur	58	Tingkat Legislasi Peraturan Perundang-Undangan	13 Proleg
	59	Pembangunan/pengembangan sistem informasi Kepegawaian	1 Unit
14. Meningkatnya pelayanan Dokumen Kependudukan	60	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	38.850 KK
	61	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	95.777 KTP
	62	Cakupan Penerbitan Kutipan Akte Kelahiran	5.125 AK
	63	Cakupan Penerbitan Kutipan Akte Kematian	6 KARTU
15. Meningkatnya pembinaan desa/kampung	64	Jumlah Kampung yang dibina	10 Desa
	65	Jumlah Kampung yang dinilai	11 Desa
16. Meningkatnya budaya olahraga dalam masyarakat	66	Jumlah Prestasi dalam bidang olahraga	9 Tropy
	67	Tingkat Peningkatan Fasilitas Sarana Prasarana dan Prasarana Olahraga	11 Unit
17. Terciptanya masyarakat yang berbudaya, berkeadilan, kesetaraan, berwawasan kebangsaan, berbasis pengetahuan dan akhlakul karimah.	68	Jumlah Pembinaan partaipolitik	0
	69	Jumlah Organisasi dan LSM yang terinventarisir	44 LSM

18. Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal:	70	Jumlah Izin yang diterbitkan	1400 Izin
	71	Jumlah Penanaman Modal Dalam Negeri yang Terdaftar	2 PMDN
MISI III			
19. Meningkatnya Produksi Hasil Pertanian	72	Tingkat produksi komoditi :	
		a. Padi	5.650 Ton
		b. Jagung	250 Ton
		c. Palawijaya	1.100 Ton
	73	Luas Lahan Tanam	2.750 Ha
20. Meningkatkan produktivitas Sektor Peternakan dalam rangka pencapaian swasembada daging	74	Jumlah Penyuluhan petani	2 Kali
	75	Jumlah pelatihan petani	2 Kali
	76	Peningkatan ketersediaan ternak per tahun	2.7 %
21. Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	77	Angka Kesakitan Hewan	24%
	78	Meningkatnya reboisasi hutan dan penghijauan lahan	5 Ha
	79	Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi	241 Ha
22. Meningkatnya produksi Perkebunan	80	Luas kerusakan kawasan hutan	79.300 Ha
	81	Tingkat produksi komoditi :	157.000 Ton
		a. Sawit b. Karet	
23. Meningkatnya produksi Perikanan	82	Luas Lahan Tanam	46.000 Ha
	83	Jumlah Hasil Produksi Perikanan Laut	11.138,33 Ton
	84	Jumlah Hasil Produksi Perikanan Air Tawar	30 Ton
	85	Jumlah sarana dan Prasarana perikanan	16 Unit

24. Meningkatnya pembinaan Koperasi	86	Jumlah Koperasi yang aktif	97 Unit
	87	Jumlah Koperasi yang sehat	30 Unit
25. Meningkatnya pembinaan UKM	88	Persentase UKMK yang mengembalikan dan bergulir	14%
26. Terakomodirnya masyarakat pengguna jasa transportasi darat	89	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten/kota	15%
	90	Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan daerah terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan	10%
	91	Tersedianya halte pada setiap kabupaten/kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	15%
	92	Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap kabupaten/kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	15%
	93	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardil) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan kabupaten/kota	20%
	94	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi kabupaten/kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji,	15%
27. Optimalisasi Mutu Pelayanan Bidang Perhubungan Darat, Sungai dan Laut di Kabupaten	95	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Terminal pada Kabupaten Kota yang telah memiliki terminal	20%
	96	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Pengujian Kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor	37,50%
	97	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota.	20%

	98	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum	20%
	99	Terpenuhi standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota.	20%
28. Penguatan Ekonomi Base Daerah bersinergi dengan peningkatan sarana dan prasarana penunjang pemberdayaan ekonomi masyarakat terakomodirnya pengguna jasa transportasi laut pada lintas dalam Kabupaten.	100	Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam kabupaten/kota pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota	20%
	101	Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam kabupaten/Kota.	10%
	102	Tersedianya pelabuhan penyeberangan pada Kabupaten/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/ Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran.	5%
	103	Terpenuhi standar keselamatan kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/ Kota	20%
	104	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT atau yang beroperasi di lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota	20%

105	Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.	20%
106	Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas atau trayek dalam Kabupaten/Kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.	20%
107	Tersedianya dermaga pada setiap ibukota Kecamatan dalam Kabupaten/Kota untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.	20%
108	Terpenuhi standar keselamatannya kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota.	20%
109	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan laut dengan ukuran di bawah 7 GT	20%
110	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.	40 Ha
111	Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota.	5 Km
112	Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan.	7 Km
113	Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat	10 Km
114	Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman.	10 Km
115	Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana	35 Km/Jam

	116	Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ hari	1.500 Jiwa
	117	Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai.	15 Unit
	118	Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota	15 Unit
	119	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun	4.670 Meter
	120	Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan.	5 Ha
29. Meningkatnya Rumah Layak Huni dan Terjangkau	121	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	140 Unit
	122	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau	500 KK
30. Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	123	Cakupan lingkungan yg sehat dan aman yg didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)	20 Desa
MISI IV			
31. Meningkatnya upaya pelestarian cagar budaya	124	Jumlah pelestarian situs resmi daerah	1 Unit
32. Pengurangan resiko bencana	125	Persentase pencegahan dini dan Penanggulangan bencana	85%
	126	Tingkat Pencegahan Diini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	85%
MISI V			
33. Meningkatnya sumber daya sektor industri dan pariwisata.	127	Jumlah objek wisata	5 Lokasi
	128	Jumlah wisatawan ke objek wisata : a. Wisatawan dalam Negeri b. Wisatawan luar Negeri	a. 17.000 Orang b. 4.000 Orang

34. Meningkatnya Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Bidang Kesenian	129	Cakupan Kajian Seni (50%)	10%
	130	Cakupan Fasilitasi Seni (30%)	5%
	131	Cakupan Gelar Seni (75%)	20%
	132	Misi Kesenian	100%
	133	Cakupan Sumberdaya Manusia Kesenian (25%)	5%
	134	Cakupan Tempat (100%)	100%
	135	Cakupan Organisasi Bidang Kesenian	100%
35. Meningkatkan penataan dan pemeliharaan prasarana dan sarana taman kota dalam rangka mengurangi pemanasan global.	136	Jumlah pembangunan taman kota	20%
	137	Persentase peningkatan penanaman tanaman pada taman jalan utama	25%
	138	Penetapan luas kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa	20%
36. Meningkatkan pemantauan dan pengawasan terhadap ketaatan pengelolaan limbah cair, emisi/polusi udara serta limbah padat dan limbah B3 oleh industri.	139	Jumlah peralatan laboratorium lingkungan	20%
	140	Jumlah industri yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air	28,56%
	141	Jumlah industri yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara.	20%
	142	Peningkatan pengelolaan limbah padat dan limbah B3 oleh industri.	25%
	143	Jumlah Kasus Pencemaran lingkungan Hidup	25%
37. Meningkatkan pemantauan dan pengawasan Danau, Sungai dan Laut terhadap pencemaran oleh limbah domestik.	144	Jumlah penambahan titik pemantauan Air Danau	14,28%
	145	Jumlah penambahan titik pemantauan Air Sungai	20%
	146	Jumlah penambahan titik pemantauan Air Laut	20%
38. Meningkatkan kualitas lingkungan terhadap Perubahan iklim dan bencana alam	147	Jumlah alat pemantau curah hujan, suhu dan kelembaban udara	14,28%
	148	Cakupan wilayah yang terpantau curah hujan, suhu dan kelembabannya	0
	149	Cakupan pengembangan data dan informasi lingkungan	50%

MISI VI			
39. Meningkatnya PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar	150	Persentase (%) Fakir Miskin dan PMKS Lainnya Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	20%
	151	Cakupan Pembinaan Para Penyandang cacat dan Trauma	(500 Orang)
	152	Persentase (%) Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) Yang Memperoleh	50%
	153	Persentase (%) Eks Penyandang Penyakit Sosial Yang Memperoleh Pembinaan Sosial Melalui Pendidikan dan Pelatihan	37%
	154	Persentase (%) Keluarga Miskin Yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya	50%
40. Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	155	Persentase (%) Panti Sosial Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial	100%
41. Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Mengevakuasi Korban Bencana Alam	156	Persentase (%) Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	80%
42. Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Cacat dan Lanjut Usia Tidak Potensial	157	Persentase (%) Penyandang Cacat Fisik Dan Mental Yang Telah Menerima Jaminan Sosial	26%
	158	Persentase (%) Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial	18%
43. Meningkatnya Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi, Berbasis Masyarakat dan Kewirausahaan	159	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	75%
	160	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat	60%
	161	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan	60%
44. Meningkatnya Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan,	162	Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan	70%
45. Meningkatnya Besaran Kasus Yang Diselesaikan dengan	163	Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian	50%

Perjanjian Bersama (PB) serta Besaran Pekerja/ Buruh yang Menjadi Peserta Jamsostek	Bersama (PB)		
	164	Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	50%
46. Meningkatnya Pemeriksaan Perusahaan dan Pengujian Peralatan di Perusahaan	165	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	45%
	166	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	50%
MISI VII			
47. Meningkatnya Jumlah Kelompok Masyarakat yang ber KB dan ber kategori keluarga sejahtera	167	Indeks Keluarga Sejahtera	20,10%
	168	Prevalensi peserta KB aktif	10,20%
	169	Jumlah Alat Kontrasepsi KB	60,000 Set
48. Terwujudnya pelayanan KIE KB - KS bagi Masyarakat dan bagi PUS yang isterinya dibawah usia 20 tahun	170	Persentase peningkatan KIE KB / KS	13%
	171	Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun	150 Orang
49. Terwujudnya Pelayanan KIE KB - KS bagi PUS untuk menjadi peserta KB Aktif	172	Cakupan Sasaran PUS menjadi Peserta KB - Aktif	10.000 Orang
	173	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	3,500 Orang
	174	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber - KB	1,100 Orang
	175	Cakupan PUS peserta KB Anggota UPPKS yang ber - KB	165 Orang
50. Meningkatkan pembinaan KB - KS bagi peserta KB Aktif Pria dan Wanita melalui PPKB yang tersebar di setiap desa / kelurahan	176	Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana / penyuluh keluarga berencana (PLKB / PKB) 1 petugas di setiap 2 desa / kelurahan	15 Orang
	177	Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 petugas di setiap desa / kelurahan	120 Orang
	178	Jumlah kelompok pembinaan	15 Kelompok
	179	Jumlah Petugas KB	60 Orang
	180	Jumlah (unit) MUPEN dan MUYAN	2 Unit
51. Meningkatnya kesehatan reproduksi remaja	181	Peningkatan Jumlah KRR	21 Kelompok
	182	Fasilitas pembinaan KB - KR yang Mandiri bagi masyarakat	11 Kelompok

Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	183	Persentase peningkatan kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak setelah penyuluhan	25%
	184	Jumlah tenaga pendamping disetiap kelompok Bina Keluarga di kecamatan	13 PLKB
	185	Persentase Peningkatan Pengembangan Model Operasional BKB - Posyandu – PADU	
MISI VIII			
53. Meningkatnya penerapan Syariat Islam yang kaffah dalam kehidupan masyarakat.	186	Jumlah Pelaksanaan Syiar dakwah dan peribadatan kepada masyarakat	25 Kali

PROGRAM PRIORITAS

ANGGARAN

Program Pendidikan Anak Usia Dini	Rp	4.950.619.000
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rp	34.100.343.700
Program Pendidikan Menengah	Rp	7.159.500.912
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Rp	174.390.000
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan	Rp	1.083.154.654
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Rp	12.390.685.000
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp	2.890.082.342
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Rp	280.613.300
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Rp	373.880.000
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Rp	391.090.000
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Rp	805.470.250
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Rp	27.538.613.228
Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata	Rp	32.204.271.420
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata	Rp	350.000.000
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan jaringannya	Rp	23.604.184.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp	-
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Rp	20.000.000
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Rp	48.480.000
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	838.466.400
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp	2.620.967.900
Program peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp	197.152.500
Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Rp	114.000.000
Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Rp	194.500.000

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Rp	75.000.000
Program Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SPKD	Rp	85.657.000
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	165.670.000
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Rp	1.200.300.000
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Rp	445.155.500
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Rp	481.807.500
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Rp	737.175.000
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Rp	298.689.591
Program penataan Administrasi Kependudukan	Rp	240.158.581
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Rp	162.875.850
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Rp	364.277.000
Program Pembinaan dan Permasalahatan Olah Raga	Rp	411.661.000
Program Peningkatan sarana dan Prasarana Olah Raga	Rp	2.400.000.000
Program Pendidikan Politik Masyarakat	Rp	20.000.000
Program Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rp	438.483.600
Program Peningkatan Produksi Pertanian	Rp	3.981.498.000
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian	Rp	251.159.400
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian	Rp	12.232.342.440
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Rp	341.366.500
Program peningkatan Kesejahteraan Petani	Rp	1.278.080.000
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Rp	5.071.936.000
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Rp	344.000.000
Program rehabilitasi Hutan & Lahan	Rp	4.449.040.000
Program Perlindungan & Konservasi Sumber Daya Hutan	Rp	200.000.000
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/perkebunan	Rp	5.646.000.000
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Rp	1.400.000.000
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Rp	100.000.000
Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Rp	6.571.030.000
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Rp	214.790.000
Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Rp	4.193.300.000
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Rp	214.000.000
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Rp	39.750.000
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Rp	974.313.000
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Rp	3.172.756.670
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Rp	2.435.535.000
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Rp	450.000.000

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Rp	1.182.315.000
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Rp	346.081.870
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp	44.875.000
Program Pengembangan & Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & Jaringan Pengairan Lainnya	Rp	17.337.722.670
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Rp	141.354.397.000
Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rp	2.879.738.942
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Rp	246.900.000
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Rp	5.093.500.100
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Rp	771.276.391
Program Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh	Rp	5.909.370.000
Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Rp	3.080.000.000
Program Perencanaan Tata Ruang	Rp	361.500.000
Program Pengembangan Perumahan	Rp	13.578.088.877
Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan	Rp	20.000.000
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Rp	296.385.200
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Rp	435.000.000
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Rp	360.000.000
Program Pengelolaan Keragaman budaya	Rp	1.721.330.000
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rp	2.615.005.000
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Rp	369.200.000
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenaga Listrikan	Rp	4.693.088.412
Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Rp	115.000.000
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Rp	894.386.000
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Rp	1.328.306.000
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Rp	84.031.000
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Rp	94.610.000
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Rp	192.735.000
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Rp	1.227.000.000
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit Sosial Lainnya)	Rp	23.948.750
Program Perberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Rp	23.775.000
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenaga Kerjaan	Rp	97.668.500

Program Keluarga Berencana (KB)	Rp	4.039.657.950
Program Kerasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Rp	45.000.000
Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp	110.000.000
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Rp	60.500.000
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rp	175.000.000
Program Penguatan Kelembagaan Pengurusatamaan Gender dan Anak	Rp	360.000.000
Program Bina Hukum Syari'at Islam	Rp	1.937.210.003
Program Dakwah dan peribadatan	Rp	6.509.645.900

Singkil, 26 Februari 2016


BUPATI ACEH SINGKIL
H. SAFRIADI, SH